KEBIJAKAN TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR, DI BAWAH KEPEMIMPINAN PARTAI *ADALET VE KALKINMA PARTISI* (AKP) DARI TAHUN 2012-2016

Oleh :
Tri Rachmad Dani
20130510292
Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Tri_rachmad_dani@yahoo.com

Abstract

Turkish Foreign Policy under Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) using politic multidimensional to bring Turkey as the main actor in Asia, Europe and Middle East, Turkish aim is to reach all regional and to show with a new political Strategic, Turkey will able to cooperate with any country, Turkey trying to open up himself without having to isolate himself to the outsideworld. In this case we can see Turkey come to Asia and trying to build cooperation with myanmar related Issue Ethnic Rohingya in Myanmar, even though not as the member of ASEAN, Turkey still come to provide humanitarian aid in rakhine and arakan or all people who need help after the conflict between Buddha and Islam in 2012 and also Turkey aid assisted by Internasional Institution. This research is to study Turkey`s policy under Adalet ve Kalkinma Partisi and trying to analyze identity of Turkey by using constructivist approach.

***Keywords* :** *Turkey`s Policy under AKP, Issue Ethnic Rohingya, humantarian aid, identity of Turkey*

I. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Agustus 2007 Abdullah Gul resmi menjadi presiden Turki yang ke-11, Ia berasal dari partai AKP *(Adalet ve Kalkinma Partisi)* atau Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Recep Tayyeb Erdogan. (Wikipedia) namun kemenangan partai AKP yang di cap sebagai partai Islam dan memiliki sebuah agenda islamis oleh militer yang dapat membahayakan sekular di Turki kemudian kekhawatiran oleh pihak Militer maupun oposisi di tanggapi oleh Gul dengan baik, Gul berjanji untuk tetap menjujung tinggi nilai-nilai sekular agar tidak adanya kudeta dari militer. (BBC, 2007)

Di masa kepemimpinannya, Gul menunjukkan bahwa ia adalah seorang diplomat yang berpengalaman, Gul berusaha memanfaatkan fungsi negaranya untuk menjadikan Turki sebagai jembatan antara kawasan Barat dan Timur (DW.Com, 2007) Turki juga menjadi penengah di antara Negara-negara yang sedang berkonflik dan Gul yakin bahwa Turki bisa menjadi model untuk ditiru oleh negara lain, seperti contohnya pemimpin dari Ennahda Tunisia yaitu Rached

Ghannouchi pernah mengatakan, “Kami belajar dari pengalaman Turki, khususnya terkait dengan situasi damai antara Islam dan modernisasi yang dicapai negeri itu.”, tidak hanya di Tunisa, Turki juga terus memberikan pengaruhnya ke negera lainnya. (Pipes, 2011)

Semenjak kemenangan partai AKP, perubahan kebijakan dalam negeri Turki mulai terlihat, budaya demokratis sudah mulai berkembang dan konstitusi sekular tidak sekaku seperti periode sebelumnya. Politik luar negerinya juga ada perubahan, semula kedekatannya dengan kawasan barat sangat erat perlahan menarik diri dengan barat, Turki menggunakan konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem* yang tujuannya untuk memanfaatkan kelebihan Turki secara geografi, budaya dan pengaruh sejarah sebagai alat interaksi Turki dalam kanah internasional, tanpa harus mengisolasi diri terhadap dunia luar melainkan keterbukaan dan penerapan politik *Soft power* kepada negara tetangga. (Budiana, 2015, hal. 1-7)

Dan politik luar negeri ini dibuktikan dengan bantuan Turki ke Myanmar terkait isu-isu kemanusiaan, Turki mencoba membantu dan bekerjasama dengan Myanmar untuk mencari solusi dengan cara yang damai. Turki datang membantu Etnis Rohingya yang terusir dan tidak diakui oleh negaranya sendiri, mereka dibantai dengan kejam dengan tujuan untuk membersihkan Etnis Rohingya dari Arakan (Choirul, 2012) pembantaian ini bisa dibilang sebagai tindakan Genosida, Genosida merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan, yang melakukan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran, pembakaran, pengambil alihan tanah dan barang, yang dilakukan baik secara sengaja sistematis oleh penguasa atau membiarkannya dengan massif atas dasar motif berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. (Thontowi, 2013, hal. 41)

Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar merupakan pelanggaran berat terkait hak asasi manusia, kebebasan dan keselamatan Rohingya telah hilang akibat *ethnic cleansing*. Dan dampak dari pembantaian ini banyak warga Rohingya yang menjadi pengungsi. Pengungsi adalah mereka yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan, Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu, sehingga timbulah pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi yang tidak dapat dihindari. (Januari, 2013, hal. 220)

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2012 merupakan bantuan pertama Turki ke rohingya setelah konflik antara agama Buddha dan Islam Di Myanmar. (Lahnie, 2012) Turki melalui Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu bersama dengan Organisasi Kerjasama Islam memberikan bantuan dana untuk Rohingya. (Maharani, 2012)Dalam kedatangan Davutoglu ke Myanmar, ia melakukan pertemuan resmi dengan sejumlah pemimpin Myanmar. Salah satunya Davutoglu bertemu dengan Presiden Thein Sein, Davutoglu juga menyampaikan rencana

Turki untuk membuka kedutaan besar Turki di Myaanmar, dan keinginan Turki ini di sambut dengan baik oleh Thein Sein. (Republika.co.id)

Pemerintahan Turki juga berusaha membantu Etnis Rohingya yang berlayan tanpa menggunakan peralatan yang aman, mereka berlayar dilautan lepas untuk mencari tempat yang mau menerima pengungsi, pada tahun 2015, di Istana Cankata, Ahmet Davutoglu menyampaikan usaha Turki untuk terus mencari pengungsi yang terdampar dengan bekerjasama dengan Organisasi Intenasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menggunakan kapal Angkatan Bersenjata Nasional Turki yang diperintahkan oleh panglima, Perdana Menteri dan Presiden Turki untuk melakukan pencarian terhadap Etnis Rohingya, mereka mencari pengungsi yang terombang ambing di sekitar Asia Tenggara tujuannya untuk membantu melindungi, mengarahkan, memberi bantuan makanan dan bahan bakar agar tiba dengan selamat di Turki kemudian diberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka (Banan, 2015)

Bantuan lainnya juga datang pada tahun 2016, menteri luar negeri Mevlut Cavusoglu yang menggantikan posisi Ahmet Davutoglu datang berkunjung untuk menemui Aung San Suu Kyi Cavusoglu, kedatangan ini untuk membahas tentang tujuan Turki untuk membantu semua pihak di wilayah miskin Rakhine bantuan yang akan diberikan tidak memandang suku, bahasa maupun agama, Turki akan membantu membuat klinik, sekolah, infrastruktur dan apa saja yang dibutuhkan, akan tetapi proyek ini tidak ada paksaan oleh pihak Turki, semua kebutuhan dan persetujuan tentunya di putuskan oleh pihak Myanmar. (Agency, 2016)

Bantuan yang di berikan terhadap Etnis rohingya sebenarnya tidak di dasarkan karena agama saja, akan tetapi pemerintahan Turki memberikan bantuan dikarenakan ingin memanusiakan manusia. Turki sedang menjalankan politik *"Soft Power"* untuk menjunjung tinggi perdamaian di dunia. Turki menerapkan diplomasi kemanusiaan *(Humanitarian Diplomacy)* yakni diplomasi yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan kemanusiaan semata, melainkan menggunakan kepemilikan kekuasaan *(Power)* dan kepekaan hati nurani (Conscience). (Febriar, 2016, hal. 67-69)

Turki juga merupakan salah satu anggota dari konvesi 1951 dan protokol 1967 (Putri, 2016, hal. 3) yang berarti Turki harus menjujung tinggi hak asasi manusia, dan sudah menjadi sebuah kewajiban untuk negara-negara yang telah meratifikasi terkait soal Konvensi 1951 untuk membantu korban kejahatan kemudian dikatagorikan sebagai pengungso pengungsi.

II. Rumusan Masalah

Dalam proposal skripsi ini, pembahasannya memfokuskan penjelasan terhadap kebijakan Turki untuk membantu Etnis Rohingya di Myanmar. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : "Mengapa Erdogan membuat kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap Etnis Rohingya?"

III. Kerangka Teori

Konstrutivisme

Teori Konstruktivisme menurut Alexander Wendt bahwa konstruksi sosial yang berada di dalam kehidupan digunakan sebagai kacamata untuk melihat sebuah fenomena, khususnya dalam Hubungan Internasional. Sebagai teori alternatif yang ada dalam Hubungan Internasional, konstruktivisme memiliki pandangan tersendiri terhadap karakter sifat manusia. Menurut konstruktivisme, dunia sosial bukanlah sesuatu yang "Given", dunia sosial merupakan wilayah intersubyektif yang berarti dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup didalamnya, serta yang memahaminya, dunia sosial dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. (Jackson & Sorensen, 2009, hal. 307-310)

Wendt berasumsi bahwa negara merupakan unit analisis penting bagi fenomena hubungan internasional, struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif ketimbang material, identitas dan kepentingan negara membangun struktur sosial. Pandangan Wendt tentang struktur sosial, bahwa struktur sosial tidak hanya dibentuk melalui nilai-nilai materil saja, tetapi ada peran nilai nonmaterial (Ide, Nilai, dan Cara Pandang) dan identitas yang menciptakan struktur sosial (Kebijakan). Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan konstruktivisme ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan identitas dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan sebuah negara, kemudian identitas juga dapat memunculkan sebuah perilaku negara terhadap negara lain. Dan ini terlihat ketika latar belakang identitas penguasa Turki yang memiliki latar belakang beragama islam yang memamsukkan nilai-nilai islam kemudian tindakannya yang membantu sesama islam (Rohingya) untuk melindungi saudaranya yang tertindas. (Febriar, 2016, hal. 66)

IV. Pembahasan

I. Kemenangan Partai Akp Di Turki Serta Politik Luar Negeri Turki Di Bawah Kepemimpinan Partai *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP)

A. Sejarah Kemenangan Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)

Turki merupakan sebuah Negara yang memiliki letak geografis yang strategis karena berdiri diantara kedua benua yaitu benua Asia dan benua Eropa dengan jumlah penduduk 99% beragama muslim. Walaupun masyarakat Turki kebanyakan beragama Islam, Turki bukanlah Negara yang secara resmi menyatakan diri sebagai Negara Islam, tetapi menyatakan diri sebagai Negara Republik. Negara Turki merupakan negara yang memiliki Ideologi Sekular yang di warisi oleh Mustafa Kemal Pasha, penjaga dari ideologi Sekular ini adalah militer. (Ramadanti, 2014)

Kemal memiliki prinsip pembaharuan di dalam Turki yaitu Nasionalisme yang terinspirasi dari Pemikiran Ziya Gokalp untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Unsur Sekulerisme diambil karena menurut pandangannya agama hanya akan membuat kemunduran bangsa. Kemudian unsur Westernisasi diambil karena menurutnya Turki harus berorientasi ke Barat yang mampu mengalahkan peradaban lain dan maju akan ilmu pengetahuan, teknologi serta unsur-unsur lainnya. Dari ketiga prinsip tersebut melahirkan ideologi Kemalisme yang terdiri atas Republikanisme sebagai pedoman Negara yaitu Negara yang berbentuk Republik, Nasionalisme digunakan sebagai paham untuk mempersatukan bangsa. Populisme (kerakyataan) yaitu merupakan oposisi solidaristik terhadap status hak-hak khusus dan monarki. Laisisme berarti kebijakan yang tidak berdasar pada agama. Estatisme yaitu kebijakan ekonomi yang diatur dan diselenggarakan oleh negara. (Fuqon, 2012, hal. 62-63)

Pada tahun 1983 berdiri sebuah partai yang berbasis Islam yaitu Partai Refah (Refah Partisi) yang masuk kedalam perpolitikan Turki yang di inisiasi oleh 3 orang yaitu Ali Turkmen, Ahmet Tekdal dan dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Tujuan didirikan Partai ini di karenakan mereka menentang dasar-dasar Republik yang didirikan oleh Mustafa Kemal Pasha, dan mereka menginginkan

membangun sebuah peradaban baru yang dapat bersaing dengan peradaban barat. Di tahun 1995 partai Refah berhasil memenang pemilihan Nasional kemudian Necmettin Erbakan berhasil naik sebagai Perdana Menteri. Tetapi pada tahun 1997 karena ada tekanan dari pihak militer, Erbakan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, pengadilan tertinggi Turki menutup partai yang ia pimpin dan melarang anggotanya untuk melakukan kegiatan politik. pengadilan Konstitusi Turki menganggap Partai Refah merupakan *"a centre of activities contrary to the principles of secularism*". Atau melakukan kegiatan yang menentang prinsip-prinsip sekuler. Dan pada tahun 1998 partai Refah resmi di tutup (Pranantha, 2014)

Rajai Kutan membentuk partai baru yaitu partai Fadhilah yang merupakan jelmaan dari partai Refah, Rajai Kutan mendirikan partai tersebut bertujuan agar Erbakan masih bisa memegang kendali partai karena ia dilarang melakukan aktifitas dimasa kepemimpinannya di Partai Refah namun pada tanggal 8 Mei 1999 Mahkamah Konstitusi membubarkan partai Fadhilah, para dewan wakil rakyat dari partai Fadhilah terpecah menjadi dua kelompok setelah partai tersbut dibubarkan. Kelompok pertama adalah mereka yang tetap mempertahankan partai Sa`adah dan kelompok kedua adalah kelompok pemuda pembaharuan seperti Recep Tayyeb Erdogan dan Abdullah Gul, mereka mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dibawah kepemimpinan Erdogan 14 Agustus 2001 (Taghian, 2016, hal. 29-32)

B. Kemenangan Partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP)

Partai AKP berdiri pada tanggal 14 Agustus 2001 yang di pimpin oleh Recep Tayyib Erdogan. (Ramadhan, 2014) Kemudian Partai ini mulai mengikuti pemilu pada tanggal 3 November 2002. Partai ini memenangkan pemilu untuk pertama kalinya dan merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah dalam di dunia perpolitikan yang ada di Turki, karena mereka merupakan Partai baru yang belum genap setahun namun berhasil memenangkan pemilu tanpa membentuk sebuah aliansi, ini adalah sebuah kemenangan yang gemilang, dimana Partai ini bisa mengatur pemerintahannya sekarang meskipun Erdogan tidak bisa langsung memimpin sendiri pemerintahanya karena konsekuensi hukuman yang diberikan, untuk itu Erdogan memberikan tugas kepemimpinannya kepada Abdullah Gul

pada tanggal 16 November 2002 hingga 14 Maret 2003, sampai larangan beraktifitas politik Erdogan dicabut. (Nuh, 2009)

Kemenangan dapat diraih dikarenakan Partai baru ini merupakan Partai yang lebih moderat dan menyesuaikan diri dengan kultur demokrasi militeristik di Turki, dengan kemenanganya partai AKP menguasai kursi di parlemen dan mengangkat kedua petinggi seperti Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul masing-masing menempati posisi sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Tokoh AKP Mehmet Muezzinoglu yang menjabat sebagai ketua AKP di Istanbul dalam pidatonya menyatakan : *"AKP is not a religious party. But it is a parti in which religious people can free at home, can feel at peace".* (Ayu, 2012)

Pada tanggal 22 Juli 2007 Abdullah Gul yang merupakan kandidat dari Partai AKP sebagai Calon Presiden berhasil memenangkan pemilihan umum Presiden, kemenangan ini berhasil mengantarkan Gul sebagai Presiden Turki yang ke-11, kemudian Erdogan diangkat menjadi Perdana menteri. AKP mendapat 47% suara dan hanya mendapatkan 341 kursi, keberhasilan ini tentunya di tandai dengan faktor-faktor yang paling menonjol yaitu apresiasi publik terkait persoalan pemulihan ekonomi di Turki, Namun, dengan langkah-langkah yang efektif untuk menangani krisis tersebut AKP melakukan kebijakan privatisasi secara bijak di berbagai industri, mempromosikan globalisasi, dan mengikatkan kebijakan ekonomi. Alhasil, Turki berhasil memulihkan dan mengembangkan perekonomian secara pesat. (Alfian, hal. 100-102)

Pada tahun 2011 kejayaan AKP masih berlanjut dengan presentase kemenangan 50% dan mendapatkan 327 kursi parlemen kemudian kemenangan di dua kali referendum hingga kemenangannya di pilpres pada 28 agustus tahun 2014, kemenangan pada pemilu ini mendapatkan suara sekitar 51% dan menjadikan Erdogan sebagai Presiden di Turki. Pemilu legislatif selanjutnya yang di adakan pada bulan juni 2015 Turki berhasil mendapatkan 41,21% dengan 259 kursi di parlemen meskipun mendapat suara tertinggi, AKP tetap tidak dapat membentuk pemerintahan mayoritas karena masih kekurangan 17 kursi lagi, sementara 3 partai lain yang lolos ke parlemen yaitu CHP, MHP dan HDP yang menyatakan tidak mau berkoalisi dengan AKP.

Jadi, AKP telah mengikuti : Pemilihan Legistalif pada tahun 2002 (34%), 2007 (40%), 2011 (50%), 2015 (4,21%). 3 kali pemilu lokal (40%, 38%, 45%), 2 kali referendum (68% dan 58%) serta pilpres pada tahun 2007 dengan Abdullah Gul sebagai presiden dan tahun 2014 Erdogan terpilih menjadi presiden. (Soekanto, 2015)

C. Perubahan Politik Luar Negeri Turki

Turki merupakan Negara yang terbentuk setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Turki terbentuk sebagai Negara Republik Konstitusional yang dibawa oleh Mustafa Kemal Pasha. Wilayah Turki yang berada di antara dua benua yaitu Eropa dan dan Asia membuat Turki memiliki hubungan yang lebih erat ke bagian Eropa ketimbang ke bagian Asia, kedekatan ini bisa terlihat ketika Turki berusaha untuk menjadi anggota tetap dari Uni Eropa, selain itu Turki juga membangun kedekatannya dengan Negara bagian Barat dengan bergabung ke dalam NATO *(North Atlantic Treaty Organization).*

Kedekatan Turki dengan Dunia Barat sudah terlihat ketika Turki mengadopsi model *Laicite* yaitu model yang mengedepankan prinsip sekularisme, prinsip ini memisahkan antara pemerintahan dengan agama, selama beberapa dekade Turki dikuasai oleh partai sekular, keadaan ini membuat Turki menjadi semakin condong dengan Dunia Barat. Berkuasanya partai sekuler ini, menyebabkan beberapa kali pembubaran partai Islam dikarenakan tidak sesuai dan bertolak belakang dengan ideologi kemalisme yang di bawa oleh Mustafa Kemal Pasha. Politik Luar Negeri Turki sangat dipengaruhi oleh ideology Kemalis dimana Politiknya memiliki prinsip *"Peace in the home, peace in the world"* serta prinsip *Westwatd* yaitu kedekatan yang lebih condong kearah barat dan tujuannya untuk melakukan westerninasi di Turki.

Pada tahun 2002 Partai AKP behasil menjadi pemenang pemilu. Kemenangan Partai membawa perubahan Politik Luar Negeri Turki terhadap Negara-negara di dunia. Pergeseran arah orientasi Politik Luar Negeri Turki yang Pro-Barat kemudian mulai bergeser secara perlahan ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga tertarik untuk meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia. (Taradewi, Wiranata, & Parameswari, hal. 1-2)

Keanggotaan Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Politik Luar Negeri Turki dan sebagai manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa, tidak terdengar lagi setelah stagnasi negosiasi keanggotaan Uni Eropa di tahun 2008. Identitas Politik Luar Negeri Turki yang baru juga terlihat ketika Ahmet Davutoglu sebagai menteri Luar Negeri yang memiliki doktrin "Strategy Depth". Davutoglu berpendapat bahwa kebijakan Politik Luar Negeri Turki telah lama tidak seimbang karena penekanan yang berlebihan terhadap Eropa Barat dan Amerika Serikat tetapi mengabaikan kepentingan Turki dengan Negara-negara lainnya. Visi Davutoglu adalah menampilkan karakteristik Neo-Ottomanism, yang sudah dibangun sejak era mantan Presiden Turgut Ozal.

Selain mempertahankan hubungannya dengan Barat, Turki juga menaruh perhatian khususnya pada dunia Timur Mengingat pandangan itu dilandasi pada sejarah dan posisi geografis, maka Turki menilai peningkatan hubungan di Asia dan perluasan pengaruh di kawasan itu sebagai strategi untuk memperbesar pengaruhnya di Eropa. Dan salah satu poin pentingnya menggunakan doktrin ini adalah gagasan untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali segala masalah dengan tetangga atau yang dikenal dengan istilah *Zero Problems with Neighbors Policy*, karena menurut Davutoglu, kepentingan strategis Turki terletak pada perdamaian, stabilitas, keamanan, kemakmuran di kawasan dan sekitarnya. (Iran Indonesia Radio, 2013)

II. SIKAP TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA

A. Sejarah Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

Pada 3 Juni 2012 warga Rakhine bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar yang dalam perjalanan pulang dari Thandwe ke Mandalay dalam rangka perjalanan da'wah Jama'ah Tabligh; disinyalir ini adalah balas dendam yang berlebihan dan sistematis terhadap kasus perkosaan yang melibatkan dua Pria muslim dan satu Pria Buddhist terhadap seorang gadis Rakhine Buddhist, yang kebenarannya juga masih dipertanyakan. Kekerasan di atas adalah bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan menjadikan

Arakan sebagai *"muslim-free region"*. Jam malam dan pembatasan gerak ini diberlakukan di Arakan Utara selama dua bulan, tapi hanya berlaku untuk warga Muslim. Tidak untuk warga Rakhine. Angkatan bersenjata hampir semua adalah Rakhine atau pro dengan Rakhine. (Nuswanto, 2012)

Presiden Myanmar Thein Sein menegaskan pada tanggal 29 juli 2012 dengan mengatakan bahwa Etnis Rohingya tidak mungkin menjadi bagian dari kewarganegaraan Myanmar karena merupakan Imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh dan menganggap kelompok ini bukan dari bagian dari Myanmar sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. (Hartati, 2013, hal. 8)

B. Bantuan-bantuan yang diberikan Turki untuk Rohingya dari tahun 2012-2016

1. Bantuan melalui pemerintah

Terjadi kerusuhan di Myanmar pada bulan juni 2012 yang kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa di kanca internasional, salah satunya negara Turki memberikan perhatiannya terhadap Etnis tersebut. Pemerintahan Turki melalui Mentri Luar Negeri Ahmet Davutoglu datang pada tanggal 8 Agustus 2012 untuk memberikan bantuannya terhadap etnis muslim Rohingya sebesar 3,4 juta lira. (Febriar, 2016, hal. 64) Pemerintah Turki juga mengirimkan delegasinya menuju kamp pengungsian untuk memberikan bantuan langsung berupa makanan untuk Rohingya yang dipimpin oleh istri Perdana Menteri yaitu Emine. (Arrahmah.com, 2012)

Bantuan selanjutnya pada tanggal 2 November 2012 yang berencana untuk membangun tiga Rumah sakit di wilayah Sitwe, ketiga rumah sakit tidak sepenuhnya untuk digunakan umat muslim, satu rumah sakit akan dibangun dekat dengan kamp umat muslim, satu lagi di kamp umat Buddha dan yang terakhir akan didirikan di pusat kota Sittwe. (Qomariah, 2012) dan di tahun 2015 pemerintahan Turki memberikan bantuan keamanan untuk Etnis Rohingya yang berada di laut luas, dengan menggunakan kapal perang Turki mencari hingga ke perairan Malaysia, Indonesia dan Thailand, bahkan Erdogan menyampaikan kepada perdana menteri Najib Razak terkait pengungsi berada hingga semenanjung di Asia Tenggara akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Turki. (Iman, 2015)

Di Tahun 2016 Turki memberikan tawaran kepada Indonesia dan Malaysia untuk membangun permukiman sementara layak huni untuk Etnis Rohingya. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam pertemuan ke-42 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Kuwait mengatakan *"Turkey will help the two countries about building settlement centers and provide material and technical support for infrastructure*". (Febriar, 2016, hal. 64)

Kedatangan Mentri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu ke Myanmar di tahun 2016 bertujuan untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Mentri Aung San Suu Kyi, kedatangan Turki adalah untuk membahas Etnis Rohingya dan kemudian menawarkan bantuan tidak hanya dikalangan warga Muslim saja akan tetapi juga keberbagai Etnis yang berada di Rakhine Cavusoglu mengatakan : "Kami akan aktif menjangkau semua daerah yang membutuhkan, membuat jalan dan membuka klinik kesehatan di seluruh negeri, Perbedaan antara kami dan negara-negara lain adalah bahwa kami tidak memaksakan proyek, bahkan kami meminta proyek dari pemerintah pusat dan daerah, Pihak berwenang di negara ini tahu apa yang dibutuhkan lebih baik dari kami, itulah sebabnya kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini" (Agency, 2016)

2. Bantuan Turki melalui lembaga internasional Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) merupakan organisasi antar pemerintah yang di miliki oleh umat Islam secara global, dan ini juga merupakan khas agama Islam yang sangat menekankan adanya Ukhuwah Islamiyah di antara sesama mereka, manfaat dan implikasi dari semangat ukhuwah itu tidak hanya untuk umat islam di dunia tetapi juga masa depan peradaban dunia secara keseluruhan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969. (Dewinta, 2016, hal. 128)

Tujuan dibentuknya OKI yaitu : 1) Meningkatkan solidaritas Islam antar anggotanya. 2) berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala benttuk dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi. 3) mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam. 4) membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya. 5) Memperteguh perjuangan islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka. (Sopiana, 2016)

Turki melalui OKI bersama dengan negara anggota lainnya terus berupaya untuk membantu Etnis Rohingya, Pada tahun 2012 pemerintah Myanmar mengizinkan masuknya OKI serta organisasi internasional lainnya seperti PMI

(Palang Merah Indonesia) dan Bulan Sabit Merah. OKI dan PMI sudah membangun 4000 rumah sebagai tempat tinggal warga muslim Rohingya. Jusuf Kalla (Ketua PMI) mengatakan komitmen ini baru setengah dari jumlah kebutuhan rumah untuk pengungsi Rohingya karena dari perhitungan mereka sedikitnya dibutuhkan 8000 rumah. Rumah yang akan dibangun ini untuk mengganti rumah mereka yang dibakar saat terjadinya kerusuhan. (Eko/Ary, 2012)

Pada tahun 2016 diadakan sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 13 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas soal umat muslim yang ada di seluruh dunia, konferensi ini dibuka dengan sebuah pidato Erdogan, dalam pidatonya beliau menegaskan bahwa "Kita, negara-negara Muslim wajib memperhatikan dan fokus dalam menciptakan perkembangan dan kemajuannya. Hubungan persaudaraan dan persahabatan antar negara-negara Muslim hendaknya tidak terbatas pada omongan belaka, melainkan harus dilakukan secara konkrit dalam aksi-aksi nyata," Erdogan menyampaikan bahwa betapa pentingnya kepada negara-negara muslim untuk saling mendukung antar negara Muslim yang tujuannya untuk membela dan membantu kaum Muslimin yang terjajah dan teraniaya diberbagai belahan dunia. (Muhammad, 2016)

Sekjen OKI berupaya keras di tingkat global, untuk menekan Myanmar agar mengambil tindakan mengakhiri penderitaan etnis Rohingya. Upaya-upaya itu sedang dilakukan lewat kantor OKI di Jenewa, New York dan Brussels guna memfasilitasi dunia internasional mengintervensi Myanmar dalam masalah tersebut. OKI sedang berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan HAM, PBB, Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya diantaranya ASEAN, untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Delegasi OKI juga melakukan pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Antar agama yang beranggotakan perwakilan dari 4 agama; Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Mereka saling bertukar pandangan tentang akar masalah dan konflik antara Muslim dan Budhis di Arakan, serta bagaimana cara membangun kepercayaan dan harmoni di antara kedua komunitas itu. (Wijaya, 2016)

Pada tahun 2016 selama bulan Ramadhan lebih dari 1.100 keluarga Rohingya yang tinggal di Sittwe negara bagian Rakhine yang mengungsi menerima bantuan pangan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI melalui organisasi Non-pemerintah HUMANiTi Malaysia mendistribusikan lebih dari 550 karung beras. Bantuan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani untuk memastikan kebutuhan dasar dan jasa, termasuk medis dan pendidikan disediakan untuk pengungsi Rohingya. (Ameera, 2016)

3. Bantuan Turki melalui lembaga dalam negeri yaitu IHH *(Insani Yardim Vakfi)*

IHH atau Insani Yardim Vakfi ini merupakan LSM yang berasal dari Turki dan diketuai oleh Fehmi Bulent Yildirim. IHH didirikan pada tahun 1992 yang berawal dari kepedulian masyarakat muslim di Turki ketika perang Bosnia, lembaga ini kemudian berkembang pesat dan melakukan banyak sekali terobosan dan aksi kemanusiaan di berbagai negara.

Huseyn Oruc adalah vice president IHH, Oruc menyampaikan pada dasarnya IHH dibangun atas 3 pilar. Relief sebagai landasan pertama dari aksi IHH, dimana seluruh gerakan IHH adalah misi kemanusiaan yang universal. Pilar kedua adalah Advokasi dan Human Rights. Membantu menyuarakan kepentingan korban konflik untuk membuka mata dunia agar kebebasan dan lepas dari penderitaan hadir di tengah tengah mereka. Oruc mengatakan : "Kita perlu bersuara tentang Palestina, Syiria, Afrika Tengah, Rohingya, Pattani, dan nasib Bangsa Moro, bukan sekedar memberi mereka makanan dan selimut di musim dingin". Pilar terakhir adalah *Humanitarian Diplomacy* (Diplomasi kemanusiaan). Lembaga-lembaga kemanusiaan Islam harus terlibat bukan hanya merespon keadaan pasca kejadian di tingkat akar rumput tapi juga seharusnya memainkan peranan penting sesuai titah dalam Al Qur'an, *ummatan wasathan* (wasit, penyaksi, pendamai). (Abilawa, 2015)

Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH telah berhasil menyampaikan sumbangan atas nama warga Turki kepada bangsa Rohingya (Arakan) Muslim di Myanmar. IHH Turki memberikan bantuan selama enam bulan, bantuan pangan yang diberikan kepada 4.000 keluarga, dan 20.000 selimut diberikan. Sumbangan tersebut dikirim ke Arakan, bagi mereka yang tinggal di desa-desa yang dikuasai polisi, atau kamp-kamp, di mana mereka berlindung setelah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. (Muslimdaily, 2014)

Organisasi kemanusiaan internasional telah menyalurkan bantuan untuk Muslim Rohingya di Aceh senilai 30 ribu euro (sekitar Rp 432 juta). Menurut Ketua Departemen Anak Yatim IHH, Resat Baser, nilai bantuan itu akan ditambah lebih besar lagi. Resat mengatakan, LSM asal Turki ini ingin membantu semua para pengungsi Rohingya di Aceh. Selama ini mereka telah bergerak di sejumlah titik pengungsian Rohingya; Aceh Timur, Aceh Utara, dan Langsa. (Akbar & Syakur, 2015)

III. IDENTITAS TURKI SEBAGAI ALASAN BANTUAN TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA

A. Identitas Turki yang menerapkan nilai-nilai Islam

Kebangkitan Turki yang dipimpin oleh seorang muslim membawa negara tersebut menjadi lebih religius dalam membuat kebijakan, memasukan nilai-nilai Islam secara perlahan, bisa di lihat dari pengaruh Atatturk yang begitu kuat sekarang berubah kembali menuju Ottoman baru. Ottoman baru juga mendominasi politik dalam dan luar negeri Turki sejak kemenangan partai AKP. Konsep baru dari negara Turki yang pondasinya dibangun oleh Ahmet Davutoglu memiliki tiga pilar utama ; Pilar pertama yaitu perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang islami dan kembali pada akar Ottoman dahulu. Pillar kedua adalah menanamkan rasa akan kebesaran Ottoman dan peraya diri pada saat politik luar negeri serta menghilangkan rasa rendah diri di hadapan negara lain. Pilar ke tiga selalu terbuka terhadap Barat dan melakukan hubungan yang berimbang dengan Timur Tengah. (Taghian, 2016, hal. 61)

Ahmed Davutoglu juga mengungkapkan pentingnya Islam bagi Turki*: "In Islamic political theory … it is 'almost impossible to find a political justification without reference to absolute sovereignty of Allah"*. Secara langsung Davutoglu menyatakan bahwa segala kebijakan terkait politik Islam Turki harus sesuai dengan ajaran-ajaran Allah.

Selain itu Davutoglu juga menganggap bahwa: *"(Turkey) the natural heir to the Ottoman Empire that once unified the Muslim world and therefore has the potential to become a trans-regional power that helps to once again unify and lead the Muslim world"* Ia yakin bahwa Turki memiliki kemampuan untuk menyatukan kekuatan regional dan memimpin dunia Muslim dalam masyarakat internasional. (Febriar, 2016, hal. 65)

AKP menjadikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sebagai diskursus partai. AKP sendiri sama sekali tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi, Pidato Erdogan di AS mengatakan : "Saya tidak menyetujui bahwa budaya Islam dan demokrasi tidak dapat direkonsiliasi" dukungan AKP terhadap demokrasi sendiri tidak terlepas dari upaya mereka untuk mengintegrasikan Turki ke dalam Uni Eropa. Dengan motif untuk memperluas kebebasan beragama sekaligus menjaga kelangsungan hidup partai. AKP melakukan reinterpretasi terhadap makna sekularisme yang dipahami oleh kelompok sekuler. Pemahaman AKP terhadap sekularisme : 1) negara harus bersifat netral dan menjaga jarak terhadap seluruh agama maupun pemeluknya. 2) negara juga harus memberikan perlindungan yang setara terhadap semua agama maupun pemeluknya. Namun, Pemahaman AKP tersebut bertolak belakang dengan pemahaman kelompok sekuler tentang sekularisme yaitu : 1) menghapus segala bentuk ekspresi keberagamaan dalam ruang publik (privatisasi agama). 2) kontrol penuh negara terhadap agama. (Fiansyah & Basyar, 2013)

B. Identitas Turki Yang Menjujung Tinggi Hak Asasi Manusia universal

Permasalahan yang terjadi di Rohingya saat ini bisa dikatakan sebagai Genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Istilah Genosida merujuk pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok itu. (Ensiklopedia Holocaust)

Tudingan masyarakat internasional terhadap kasus *genocide, massacre, atau ethnic cleansing* terhadap minoritas Rohingya telah menjadi isu penting bulan Agustus 2012. Kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap Minoritas suku Rohingya menjadi isu hukum internasional yang relevan. minoritas Muslim Rohingya telah tinggal beraba dabad di Myanmar merupakan fakta historis. Namun, perlakuan pemerintah untuk tidak mengakui mereka sebagai warga negara telah menimbulkan persoalan hukum dan HAM. (Thontowi, 2013, hal. 41)

Namun untuk saat ini yang masih diupayakan oleh negara Turki adalah untuk mengurangi penderitaan dengan bantuaan kemanusiaan, belum pada tahap untuk menggunakan kekerasan, pihak Turki berharap bisa membantu merekonsiliasi antara pihak yang berkonflik di Myanmar tanpa harus menggunakan kekerasan, pemerintahan Turki memilih jalan damai untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti mengadakan sebuah kerjasama, meningkatkan perekonomian di Myanmar agar tidak ada rakyat miskin yang memicu untuk lebih bertindak anarkis, serta membangun kedutaan didalam Myanmar untuk mempermudahkan komunikasi dan bantuan yang akan diberikan kepada korban.

Genosida merupakan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran HAM, mereka tidak memberikan kemerdekaan, kebebasan, dan rasa keamanan kepada Etnis tersbut. Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan yang maha esa (YME). Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. (Apriyanti, 2017)

Etnis Rohingya merupakan salah satu Etnis yang paling ditindas keberadaannya dan etnis ini tegolong menjadi salah satu pengungsi. Maka dari itu badan PBB melalui UNHCR juga turut aktif membantu Rohingya dalam menyelesaikan masalah ini, di mana negara-negara penandatangannya berupaya untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini., di dalam konvensi 1951 tentang status pengungsi yaitu “Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan an ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara teresebut". (UNHCR Indonesia, 2016)

Konvensi tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Internasional terhadap Status Pengungsi. (Simbolon, 2014) Kemudian karena status Turki merupakan salah satu negara sebagai peserta Konferensi yang pada saat itu berlangsung di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951. dan juga Turki telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokolnya. (Putranto, hal. 65)

Berdasarkan Konvensi dan Protokol tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi harus bekerja sama dengan UNHCR dan membantu menjalankan fungsinya, yang ditetapkan didalam UNHCR tahun 1950 gunanya untuk mencegah dan memperjuangkan hak asasi manusia. Fungsi lainnya adalah untuk memberantas negara-negara lain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait isu kemanusian melalui perlindungan pengungsi. Dan Turki adalah salah satu negara yang membantu dan bertanggung untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internasional. (Damayanti, 2016, hal. 94)

IV. Kesimpulan

Dalam bantuan Turki ke Rohingya dapat di tarik kesimpulan bahwa identitas sangat mempengaruh jalannya dari kebijakan luar negeri sebuah negara, Turki di bawah partai AKP, dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang Islam dan membawa nilai-nilai keislamannya didalam membuat sebuah kebijakan, argumen ini dapat diperkuat dengan pernyataan Erdogan dalam KTT ke 13 OKI yang mengatakan "Kita, negara-negara Muslim wajib memperhatikan dan fokus dalam menciptakan perkembangan dan kemajuannya. Hubungan persaudaraan dan persahabatan antar negara-negara Muslim hendaknya tidak terbatas pada omongan belaka, melainkan harus dilakukan secara konkrit dalam aksi-aksi nyata"

Dan sebuah argumen lainnya yang menegaskan "Umat Islam tidak mengenal batas geografi di masa lalu maupun saat ini, dan melihat kaum muslimin yang jaraknya ribuan kilometer di Arakan (Rohingya), Aceh, Palestina, Somalia, sebagaimana mereka melihat saudara kepada saudaranya." Yang berarti bantuannya ke Rohingya merupakan sebuah kewajiban seorang muslim membantu muslim lainnya yang dalam kesulitan. Ditambah partai AKP didukung oleh anggota-anggota partai yang memiliki pengalaman yang baik dalam berpolitik, salah satunya Ahmet Davutoglu yang memiliki pengaruh cukup signifikan dengan konsep "*Strategy depth"* dan "*Zero Problem"* dalam menjalankan politik luar negerinya, dengan konsep ini pemerintahan Turki berharap dapat memainkan peran yang lebih dalam di setiap kawasan dan membangun kerjasama yang baik tanpa harus bermasalah dengan sebuah negara.

Meskipun pemimpin Turki mengatakan bahwa Partai AKP bukan sebuah partai Islamis yang membawa agenda-agenda seputar tentang islam, namun partai ini adalah partai yang flexibel dalam menjalankan roda kepemerintahannya, ia

dapat mengkombinasikan nilai-nilai keislaman, sekular mau pun demokrasi, dan hal ini membuat partai ini masih bertahan hingga sekarang, partai yang dibawah pimpinan Recep Tayyib Erdogan ini mampu melihat situasi dan bisa melihat apa yang dibutuh kan rakyat, karena sejatinya Turki memiliki rakyat yang mayoritas Islam dan juga rakyat yang pro sekular, jika Turki mampu memainkan perannya dengan baik dalam mengkombinasikan Islam, sekular dan demokrasi maka untuk menyatukan rakyat bukanlah hal yang mustahil didalam pemerintahnnya.

Daftar Pustaka

JURNAL DAN BUKU

Alfian, M. A. (n.d.). Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki. 100-102.

Budiana, A. M. (2015). Penolakan Pemerintahan Turki di bawah AKP Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013. 1-7.

Damayanti, R. (2016). Kebijakan Turki Dalam Merespon Kasus Pengungsi Rohingya Dari Myanmar. 94.

Dewinta, R. T. (2016). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2*, 128.

Febriar, R. (2016). Identitas dan Kebijakan Luar Negeri : Bantuan Kemanusiaan Turki Kepada Etnis Rohingya Pasca Konflik Komunal Myanmar Tahun 2012-2015. *Journal of International Relations*.

Fuqon, T. (2012). Reformasi Kebudayaan di Republik Turki (1923-1950). 62-63. Retrieved from Reformasi Kebudayaan di Republik Turki (1923-1950).

Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Januari, N. (2013). Peran United Nation High Of Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2009-2010. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 220.

Putranto, H. W. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGUNGSI SURIAH). *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 65.

Putri, A. Z. (2016). Kebijakan Turki dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011 - 2013. *Journal of International Relations,Volume 1, Nomor 1*, 3.

Simbolon, R. R. (2014). Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 450.

Taghian, S. (2016). *Asy-Syaikh Ar-Rais Rajab Thayyib Errdogan-Mu`addzin Istanbul wa Muhathim Ash-Shanam Al-Atatturki.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Taradewi, D. A., Wiranata, I. A., & Parameswari, A. I. (n.d.). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok pada Masa Pemerintahan Adalet Ve e. 1-2.

Thontowi, J. (2013, Agustus 28). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta*, 41.

Wijaya, D. (2016, November 21). Retrieved from ALIMANCENTER.COM: https://alimancenter.com/dunia/beberapa-langkah-oki-menyelesaikan-tragedi-muslim-rohingya/

WEBSITE

(n.d.). Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl

(n.d.). Retrieved from Ensiklopedia Holocaust: https://www.ushmm.org/wlc/id/article.php?ModuleId=10007043

(2007, Agustus 28). Retrieved from BBC: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/08/printable/070828_turkey_elex.shtml

(2007, April 25). Retrieved from DW.Com: http://www.dw.com/id/abdullah-g%C3%BCl-kandidat-presiden-turki/a-2956461

(2012, Agustus 11). Retrieved from Arrahmah.com: https://www.arrahmah.com/2012/08/11/foto-foto-delegasi-turki-saat-mengunjungi-kamp-pengungsian-muslim-rohingya-di-arakan/

(2013, januari 9). Retrieved from Iran Indonesia Radio: http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/57224-Melihat_Doktrin_Strategic_Depth_Turki

(2014, Februari 08). Retrieved from Muslimdaily: http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/turki-sampaikan-bantuan-kepada-muslim-rohingya-di-arakan.html

(2016). Retrieved from UNHCR Indonesia: http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr

Abilawa, M. S. (2015, November 04). Retrieved from Forum Zakat: http://forumzakat.org/belajar-dari-ihh-dan-turki/

Agency, A. (2016, Juni 15). Retrieved from Middle East Updat: http://www.middleeastupdate.net/turki-akan-memberikan-bantuan-untuk-seluruh-wilayah-rakhine-dan-meminta-muslim-rohingya-diberi-kewarganegaraan/

Akbar, C., & Syakur, M. A. (2015, Mei 29). Retrieved from Hidayatullah.com: https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/05/28/70539/ihh-salurkan-rp-432-juta-untuk-rohingya-resat-kumandangkan-iqomat.html

Ameera. (2016, Juni 28). Retrieved from Arrahmah: https://www.arrahmah.com/2016/06/28/pengungsi-rohingya-di-myanmar-menerima-paket-bantuan-ramadhan-dari-oki/

Apriyanti, D. (2017). Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/7931028/Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights_Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights

Ayu, A. W. (2012, January 29). Retrieved from http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44455-Wanda%20Ayu%20A

Banan. (2015, Mei 21). Retrieved from Arrahman: https://www.arrahmah.com/news/2015/05/21/turki-kirim-kapal-angkatan-laut-untuk-bantu-muslim-rohingya.html

Choirul. (2012, Agustus 2012). Retrieved November 5, 2016, from TEMPO.CO: http://m.tempo.co/read/news/2012/08/14/118423463/Jumpa-Muslim-Myanmar-Istri-PM-Turki-Menangis

Eko/Ary. (2012, Agustus 13). Retrieved from Iradio: http://iradiofm.com/oki-dan-pmi-akan-bangun-rumah-warga-muslim-rohingya/

Fiansyah, R., & Basyar, H. (2013). Retrieved from http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S45456-Rahmat%20Fiansyah

Hartati, A. Y. (2013, April). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Ilmu Hubungan internasional, Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 8. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=353891&val=8103&title=Studi%20Eksistensi%20Etnis%20Rohingya%20di%20Tengah%20Tekanan%20Pemerintah%20Myanmar

Iman, C. (2015, Mei 22). Retrieved from Cahaya Iman: https://cahyaimancahayakebenaranislam.wordpress.com/2015/05/22/pantaslah-turki-sebagai-negara-pemegang-amanat-sejarah-kilafiah-al-islamiah-dimasa-pemerintahan-otoman-dulu-angkatan-laut-turki-dikerahkan-mencari-muslim-rohingya-di-perairan-indonesia-thailan

Lahnie, C. (2012, Agustus 13). Retrieved November 5, 2016, from Salam-Online.com: http://www.salam-online.com/2012/08/pm-turki-erdogan-peringatkan-pemerintah-myanmar-agar-berhenti-merendahkan-umat-islam.html

Maharani, A. (2012, Agustus 14). Retrieved from Merdeka.com: https://www.merdeka.com/dunia/istri-pm-turki-menangis-lihat-kondisi-pengungsi-rohingya.html

Muhammad, K. (2016, April 15). Retrieved from Hidayatullah,com: https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/04/15/93117/erdogan-ajak-negara-negara-islam-ciptakan-ukhuwah-dalam-aksi-nyata.html

Nuh, M. (2009, Februari 5). Retrieved from eramuslim: https://www.eramuslim.com/berita/silaturrahim/erdogan-dan-dakwah-islam-di-turki.htm#.WJUqw9KLTIU

Nuswanto, H. S. (2012, Agustus 23). Retrieved from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan_55171d09813311c9669de1e7

Pipes, D. (2011, April 12). Retrieved from DanielPipes.Org: http://www.danielpipes.org/9671/ambitious-turkey

Pranantha, N. (2014). Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/18744252/PERJUANGAN_PARTAI_REFAH_DALAM_POLITIK_DOMESTIK_TURKI

Qomariah, H. (2012). *Bulan Sabit Merah Turki Siap Bangun Tiga Rumah Sakit Darurat Untuk Rohingya.* Islam Pos.

Ramadanti, A. G. (2014, Mei 28). Retrieved from Web Unair: http://andanigita-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-103536-Negara%20Agama%20dan%20Demokrasi-TURKI%20DALAM%20PERKEMBANGAN%20DINAMIKANYA%20%20SEBELUM%20DAN%20SESUDAH%20ERA%20MODERN.html

Ramadhan, S. (2014, April 11). Retrieved from Suara-Islam.com: http://www.suara-islam.com/read/kabar/laporan-khusus/10560/Belajar-dari-Sang-Muadzin-Istanbul

Republika.co.id. (n.d.). Retrieved from http://www.republika.co.id/amp_version/m8iffp

Soekanto, S. S. (2015, Oktober 18). Retrieved Februaru 13, 2017, from Universitas Indonesia Doktor Politik: http://doktor-politik-ui.net/2015/10/menimbang-prospek-islam-politik-di-turki-menjelang-pemilu-ulang-1-november-2015/

Sopiana, A. (2016, Maret 11). Retrieved from Sridianti.ccom: http://www.sridianti.com/sejarah-dan-tujuan-organisasi-konferensi-islam-oki.html